



**PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06

Telp.: (0254) 7914504

Fax : (0254) 7914503

Email : [pnserang12@gmail.com](mailto:pnserang12@gmail.com)

Website : [www.pn-serang.go.id](http://www.pn-serang.go.id)

Nomor SOP	W29.U1/ 18 /SOP/PDT/II/2022
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
Tanggal Revisi	11 Agustus 2022
Tanggal Efektif	11 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Ketua PN. Serang  <u>TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.</u> NIP. 19640516 199712 1 001
NAMA SOP	PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).</i></li><li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum</li><li>5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak .</li><li>6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Jo PERMA 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepanitraan Dan Kesekretariatan Pengadilan</li><li>8. Peraturan Mahakam Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik</li><li>9. Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Peddoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstras Pengadilan .</li><li>12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012tentang Standar Pelayanan Peradilan</li><li>13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/ KMA/SK/VIII/2019 Tentang Pertunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .</li><li>14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadikan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Strata 3</li><li>2. Stara 2</li><li>3. Stara 1</li><li>4. Diploma</li><li>5. SMU Sederajat</li></ol>
	<b>PERINGATAN / CATATAN</b>
	Jika SOP ini tidak di laksanakan maka pengiriman berkas peninjauan Kembali akan terlambat
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Strata 3</li><li>2. Strata 2</li><li>3. Strata 1</li><li>4. Diploma</li><li>5. SMU Sederajat</li></ol>
	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Aplikasi SIPP</li><li>5. Dokumen Pendukung</li></ol>
	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sipp</li><li>2. Registrasi Induk Perkara Gugatan</li><li>3. Register Banding Perdata</li><li>4. Buku Jurnal Keuangan Perdata</li></ol>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PTSP	MEJA III	JS/ JSP	PANMUD	PANITERA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan permohonan PK			Tidak			- Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PK - Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pencabutan - Register Induk - Berkas Perkara - ATK	1 Jam	Diterimanya permohonan pencabutan permohonan PK dari Pemohon	
2	Menditi persyaratan permohonan pencabutan permohonan PK			Ya			- Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PK - Surat Kuasa jika ada - SIPP	1 Jam	Persyaratan permohonan terpenuhi / tidak terpenuhi	
3	Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK						- Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PK - ATK	1 Jam	Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK	
4	Membubuhkan paraf pada konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK						- Konsep Akta Pencabutan Pernyataan PK - ATK	1 Jam	Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK sudah diparaf	
5	Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK bersama Pemohon						Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK sudah diparaf	1 Jam	Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK	
6	Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK ke Kepaniteraan MA						- Buku ekspedisi - ATK - Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK sudah ditandatangani	1 Jam	Tanda bukti pengiriman	*1
7	Menginput pencabutan pernyataan PK kedalam SIPP dan mencatat dalam Register						- Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK - SIPP - Register - ATK	1 Jam	Data terinput kedalam SIPP dan tercatat pada Register	
8	Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan PK						- Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK - Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan PK	6 Jam	Termohon PK telah menerima pemberitahuan pencabutan permohonan PK	
9	Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan PK pada SIPP						- Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan PK - SIPP	1 Jam	Tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan PK tercatat dan relaas terunggah pada SIPP	
10	Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan PK pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register PK						- Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan PK - Register Induk Perkara Gugatan - Register PK - ATK	1 Jam	Pencabutan permohonan pernyataan PK tercatat pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register PK	
11	Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK ke Kepaniteraan MA						- Surat Pengantar - Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK	1 Jam	Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK terkirim	
12	Mengarsipkan berkas perkara PK						Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK	1 Jam	Arsip tersimpan	

**PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN**

- |    |   |
|----|---|
| *1 | a. Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan PK tidak perlu dikirim.<br>b. Dalam hal berkas perkara PK sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan PK harus dikirim ke Kepaniteraan MA |
|----|---|